

**DAMPAK PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT TERHADAP  
KONDISI EKONOMI RUMAH TANGGA PETANI  
(Di Desa Soronalan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang)**

*(People's Forest Management Impact Towards the Farmer's Household Economic Conditions:  
Case Study of Soronalan Village, Sawangan, Magelang )*

**Pantja Siwi VR Ingesti**

**ABSTRACT**

*The research takes place in Soronalan village, Sawangan, Magelang, aiming to find out the influence of people's forest management towards income, poverty and income distribution among the farmers. The selection of this reseacth location is done by purposive sampling, taking 60 farmers as samples by Proportionate Random Sampling. The samples are classified into two groups, first is the people's forest with a commodity combination of Sengon (*Albizia falcataria*) - Coconut - Grass, and the second is the people's forest commodity combination of Sengon - Coconut - herbs. The data analysis is done by Gini Ration. The research results indicate that the people forest management can increase the farmer household income, reduce poverty and increase prosperity, and level the income distributions among farmer families.*

*Key words : people's forest management, economic condition, farmer household*

**PENDAHULUAN**

Dewasa ini tuntutan terhadap pemanfaatan lahan dirasakan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pertambahan penduduk selalu mengarah pada permintaan terhadap lapangan pekerjaan baru, lahan pemukiman baru maupun lahan untuk industri, dengan demikian luas lahan pertanian akan semakin berkurang. Pertambahan penduduk juga akan meningkatkan kebutuhan akan kayu, baik untuk perkakas rumah tangga maupun untuk kayu bakar. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, penggunaan lahan perlu dilakukan secara efisien. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberdayakan tanah yang kurang produktif dan tanah kritis, dimana keberadaan tanah tersebut di Indonesia pada saat ini masih tergolong luas.

Hutan rakyat merupakan salah satu contoh dari pemanfaatan tanah yang kurang produktif dan kritis dengan maksud agar dapat digunakan secara optimal, disamping itu juga merupakan suatu upaya melakukan rehabilitasi lahan kritis, peningkatan mutu lingkungan, menunjang pemenuhan kebutuhan kayu lokal/rakyat dan bahan baku industri pengolahan kayu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja serta pada akhirnya terarah pada upaya pengentasan kemiskinan (Anonimus, 1995).

Hendro Prastowo *dalam* Ritohardoyo (2000) mengungkapkan hasil sensus penduduk tahun 1990, jumlah penduduk miskin di sekitar hutan sebesar tiga puluh empat persen (34%) dari seluruh penduduk miskin di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tersebut terkait dengan pembangun-

an hutan bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar hutan terwujud dalam program untuk mendorong pengembangan hutan rakyat. Sasaran lokasi pengembangan hutan rakyat dapat di lahan milik, lahan marga dan lahan yang tidak produktif. Sasaran ekonomi peningkatan produksi kayu hutan rakyat dan komoditas ikutannya, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Penggunaan lahan untuk hutan rakyat di Indonesia telah banyak dilaksanakan. Di Pulau Jawa hutan rakyat lebih dikenal dengan nama hutan kemasyarakatan, dalam bentuk pengelolaan hutan rakyat baik yang berasal dari kegiatan program penghijauan, maupun hutan rakyat yang dikembangkan masyarakat secara swadaya.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki lahan kritis cukup luas yaitu 17.743 hektar, maka dari itu pengembangan hutan dan kebun rakyat merupakan salah satu upaya yang strategis dalam pembangunan. Hutan rakyat yang telah berkembang seluas 9.493 hektar, dan hutan negara seluas 10.544,4 hektar. Dengan demikian jumlah luas hutan di Kabupaten Magelang seluas 20.037,4 hektar atau 18,46 persen dari luas wilayah Kabupaten Magelang. Sedangkan untuk keseimbangan ekosistem seharusnya luas hutan adalah 30 persen dari luas wilayah Kabupaten Magelang (Anonimus, 2000).

Desa Soronalan termasuk salah satu wilayah yang mengembangkan hutan rakyat

terluas di Kecamatan Sawangan. Hutan rakyat yang banyak dikembangkan adalah hutan rakyat campuran. Jenis tanaman yang diusahakan adalah tanaman sengon (*Albizia falcataria*) sebagai tanaman utama. Tanaman Kelapa sebagai tanaman sampingan dan tanaman rumput atau tanaman obat sebagai tanaman penutup tanah. Sengon merupakan tanaman tahunan dengan jangka waktu pemanenan pada saat tanaman berumur lebih dari 5 (lima) tahun, berada di dalam lahan hutan rakyat sebagai tanaman tegakan utama berfungsi untuk menahan erosi, sedangkan tanaman kelapa berada di pinggir lahan hutan rakyat berfungsi untuk penguat teras, dan tanaman rumput atau obat-obatan sebagai tanaman di bawah tegakan berfungsi untuk penutup tanah. Dengan demikian terdapat dua jenis hutan rakyat campuran, yaitu pola pertama yang terdiri dari tanaman sengon, kelapa, rumput dan pola kedua yang terdiri dari tanaman sengon, kelapa, tanaman obat.

Pada tahun 2004 rata-rata umur tanaman sengon berkisar antara 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian sudah melewati masa panen. Kebiasaan dalam pemanenan kayu sengon dilakukan tidak berdasarkan umur tanaman, akan tetapi tergantung besar kecilnya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi petani, misalnya punya hajat atau membayar biaya pendidikan yang cukup besar, sehingga sebagian petani menganggap bahwa tanaman sengon merupakan tanaman yang digunakan untuk investasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeta-

hui tingkat ekonomi rumah tangga petani hutan rakyat di Desa Soronalan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, khususnya untuk: (1) Mengetahui pendapatan rumah tangga petani hutan rakyat; (2) Mengetahui dampak usahatani hutan rakyat terhadap tingkat kemiskinan rumah tangga petani hutan rakyat; dan (3) Mengetahui dampak usahatani hutan rakyat terhadap distribusi pendapatan rumah tangga petani hutan rakyat.

Hutan rakyat adalah usahatani tanaman yang didominasi oleh jenis tanaman kayu-kayuan di lahan kritis, milik petani di luar kawasan hutan (Anonimus, 1996). Menurut Nurwanto dan Prakoso (1979), walaupun istilah hutan rakyat dikenal dengan “hutan“ namun dalam pengertian ini harus dibedakan, yaitu yang dimaksud hutan rakyat adalah penghijauan suatu daerah untuk dibentuk sebagai hutan, yang oleh karena wilayah peruntukan serta pengelolannya ada pada rakyat.

Tujuan pembangunan hutan rakyat pada awalnya diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan kritis atau tidak produktif, dan pada saat ini telah berkembang menjadi usaha perhutanan rakyat sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha, disamping sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu. Pemilihan jenis tanaman dalam pembuatan hutan rakyat disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan dan kemungkinan-kemungkinan perkembangannya. Jenis tanaman yang

diprioritaskan dalam pembangunan hutan rakyat perlu diselaraskan dengan manfaat, tujuan atau sasaran penghijauan.

Menurut Harahap (1993) pengembangan hutan rakyat diarahkan pada tanah-tanah kritis, tanah-tanah tidak produktif dan terlantar di lahan milik. Sedangkan jenis tanaman yang diusahakan adalah jenis yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan cepat, sesuai dengan keinginan masyarakat setempat dan mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Menurut Supriyadi *dalam* Indrawati (2002) saat ini luas hutan rakyat di Indonesia telah mencapai 1.265.460,26 hektar baik yang dikembangkan secara swadaya, dengan subsidi maupun kemitraan. Dari luasan yang telah dicapai tersebut sebagian besar merupakan hutan rakyat swadaya yaitu seluas 1.151.653,13 hektar atau lebih kurang 31 persen.

Penelitian dampak pengembangan sesuatu kegiatan pertanian terhadap penggunaan tenaga keluarga, pendapatan dan kesejahteraan keluarga sudah banyak dilakukan. Hasil penelitian Dampa (2003) tentang dampak pengembangan kakao bagi ekonomi rumah tangga tani Arfak di Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa pengembangan kakao berdampak pada peningkatan pendapatan, distribusi pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Kontribusi pendapatan kakao terhadap total pendapatan petani tergolong besar yaitu sebesar 60,99%. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasyari (2002) tentang analisa potensi dan kontribusi kayu rakyat terhadap total

pendapatan rumah tangga petani menunjukkan bahwa sumber-sumber pendapatan petani hutan rakyat berasal dari usahatani, kayu rakyat, peternakan dan sektor lain. Kayu rakyat ternyata menempati posisi yang penting dalam struktur pendapatan petani dan rata-rata persentase kontribusinya terhadap pendapatan total rumah tangga petani berada pada urutan kedua setelah pendapatan dari usahatani.

Penganekaragaman jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jenis tanaman yang dibudidayakan maka semakin banyak pula sumber pendapatan yang diperoleh petani. Soekartawi (1994), berpendapat bahwa kebanyakan petani sering mengusahakan usahatani dengan lebih dari satu tanaman untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Hal ini disebabkan oleh : (a). Tersedianya sumberdaya di daerah pertanian tersebut memungkinkan petani berusahatani dengan lebih dari satu macam tanaman. (b). Luas lahan yang sempit sehingga petani berupaya memaksimalkan pendapatan usahatannya melalui usaha yang beraneka ragam. (c). Harga satu produk yang tidak mendorong arah untuk mendapatkan keuntungan maksimum sehingga petani melakukan kombinasi dengan mengusahakan tanaman lebih menguntungkan (d). Petani mungkin berusaha memperkecil resiko dengan cara berusahatani lebih dari satu macam tanaman, artinya bila tanaman yang satu gagal maka kegagalan itu dapat ditutup dengan hasil dari tanaman lain yang diusahakan. (e).

Adanya dua macam tanaman atau lebih yang kalau dilihat dari segi biologi saling memberikan manfaat atau salah satu dari tanaman tersebut mendukung pertumbuhan vegetatif pertumbuhan tanaman yang lainnya.

Menurut Soekartawi (1994), pendapatan kotor usahatani didefinisikan sebagai nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu (umumnya satu tahun) baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Pengeluaran total usahatani (*total farm income*) didefinisikan sebagai nilai semua masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan didalam produksi, tidak termasuk tenaga kerja keluarga petani. Selanjutnya selisih antara pendapatan kotor dan pengeluaran total usahatani disebut dengan pendapatan bersih usahatani (*net farm income*).

Berdasarkan sumber penghasilan, seperti dikemukakan Suratijah (1994) : penghasilan rumah tangga berasal dari tiga hal, yaitu : (1) dari kegiatan *on farm* atau usahatani, (2) dari *off farm* yaitu kegiatan pada perusahaan, pekerjaan upahan pada usahatani orang lain dan perusahaan-perusahaan pertanian, (3) lainnya yaitu kegiatan selain (1) dan (2) tersebut. Dengan demikian petani akan memperoleh pendapatan total sebesar :

$$TFI = (On-FI) + (Off-FI)$$

Keterangan :

TFI = Pendapatan Total Rumah Tangga Petani

On-FI = *On-Farm Income* (pendapatan dari usahatani)

Off-FI = *Off Farm Income* (pendapatan luar usahatani)

Tingkat kemiskinan pada umumnya merupakan suatu kondisi masyarakat sebagai

---

akibat terjadinya kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Patokan garis kemiskinan yang sering digunakan di Indonesia adalah garis kemiskinan yang dikemukakan oleh Sayogyo (1982) yaitu dengan menggunakan tingkat pendapatan perkapita per tahun yang disetarakan ke dalam kilogram beras. Batasan kemiskinan menurut Sayogyo adalah sebagai berikut: 1) Miskin

sekarat, apabila pendapatan perkapita per tahun 240 Rp atau 600 Rp; 2) Miskin apabila pendapatan per kapita per tahun 403 Rp atau 605 Rp; 3) Miskin apabila pendapatan per kapita per tahun 408 Rp atau 607 Rp; 4) Miskin apabila pendapatan per kapita per tahun 410 Rp atau 610 Rp.

Hipotesis Penelitian

1. Diduga usahatani hutan rakyat dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga petani hutan rakyat
2. Diduga rumah tangga petani hutan rakyat tidak miskin
3. Diduga distribusi pendapatan rumah tangga petani hutan rakyat merata.

**METODE PENELITIAN**

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, perhatian dipusatkan pada daerah pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Magelang tahun 2004, dengan maksud untuk

memperoleh gambaran mengenai pendapatan rumah tangga petani hutan rakyat.

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja di Kecamatan Sawangan yang merupakan salah satu daerah pengembangan hutan rakyat terluas di Kabupaten Magelang. Adapun desa yang dipilih adalah Desa Soronolan, yaitu desa yang mempunyai luas areal hutan rakyat terluas. Sampel akan diambil secara *proportionate stratified random sampling* sebanyak 33 KK untuk petani yang mengusahakan hutan rakyat Pola 1 dan 27 KK yang mengusahakan hutan rakyat Pola 2.

Data terdiri dari data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan petani sampel serta melakukan pengamatan langsung di lapangan. dan data sekunder diperoleh dari lembaga/instansi pemerintah baik pemerintahan tingkat desa, kecamatan, biro statistik, dan dinas pertanian.

Untuk mengetahui tingkat pendapatan rumah tangga, terlebih dahulu dilakukan penghitungan pendapatan rumah tangga baik pada petani hutan rakyat pola 1 maupun pola 2. Perhitungan pendapatan rumah tangga diperoleh dari kegiatan usahatani hutan rakyat dan dari usahatani non hutan rakyat.

Tingkat kemiskinan diukur dari besarnya pendapatan rumah tangga dengan menggunakan kriteria Sajogyo (1982), untuk daerah pedesaan yaitu menggunakan tingkat pendapatan per kapita per tahun yang disetarakan ke dalam kilogram beras.

Untuk mengetahui distribusi pendapatan dianalisis dengan nisbah gini (*gini ratio*)

dengan rumus :

$$GR = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k P_i [F^*(Y_i) + F^*(Y_{i-1})]}{n}$$

Keterangan :

GR = Nisbah gini

n = Jumlah sampel

$P_i$  =  $1/n$

i = Nomor sampel rumah tangga

$F^*(Y_i)$  = Persentase pendapatan rumah tangga petani ke-I terhadap total pendapatan rumah tangga

$F^*(Y_{i-1})$  = Jumlah persentase kumulatif rumah tangga petani ke (i-1)

Untuk menentukan apakah distribusi pendapatan rumah tangga petani hutan rakyat merata atau timpang digunakan kriteria :

- Semakin besar nilai GR (mendekati 1) distribusi pendapatan semakin timpang
- Semakin kecil (mendekati 0) distribusi pendapatan semakin merata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pendapatan Rumah Tangga Petani Hutan Rakyat

Pendapatan total petani adalah pendapatan yang diperoleh petani baik dari

kegiatan usahatani maupun dari luar usahatani. Pendapatan petani baik pada pola 1 maupun pola 2 bersumber pada kegiatan usahatani yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan, serta pendapatan yang bersumber dari luar usahatani. Distribusi pendapatan rumah tangga petani hutan rakyat ditinjau dari sumbangan setiap sumber pendapatan petani pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga petani hutan rakyat tahun 2004 untuk pola 1 sebesar Rp 5.725.537 dan untuk rumah tangga petani hutan rakyat pola 2 sebesar Rp 7.602,512. Pendapatan terbesar berasal dari usahatani non hutan rakyat sebesar 61,48 % untuk pola 1 dan 60,16 % untuk pola 2.

Kemudian perbandingan antara pendapatan non hutan rakyat dan hutan rakyat dengan pendapatan non hutan rakyat disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa dengan adanya hutan rakyat maka besarnya pendapatan rumah tangga petani di Desa Soronalan meningkat. Pada petani pola 1 besarnya

Tabel 1. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Petani Hutan Rakyat menurut Sumber Pendapatan di Desa Soronalan tahun 2004.

Jenis Sumber Pendapatan	Rata-rata Pendapatan			
	Pola 1		Pola 2	
	Jumlah (Rp)	Persen (%)	Jumlah (Rp)	Persen (%)
1. Hutan Rakyat	2.205.567	38,52	3.028.882	39,84
2. Non Hutan Rakyat	3.519.970	61,48	4.573.630	60,16
Jumlah	5.725.537	100,00	7.602.512	100,00

Sumber: Analisis data primer, 2004.

pendapatan non hutan rakyat sebesar Rp 3.519.970 dengan adanya usahatani hutan rakyat maka pendapatan menjadi Rp 5.725.537 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.205.567 atau 62,66 persen. Pada petani pola 2

besarnya pendapatan non hutan rakyat sebesar Rp 4.573.630 dengan adanya usahatani hutan rakyat maka pendapatan menjadi Rp 7.602.512 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 2.205.567 atau 66,22%.

Tabel 2. Perbandingan Pendapatan Non Hutan Rakyat dan Hutan Rakyat dengan Pendapatan Non Hutan Rakyat di Desa Soronalan Tahun 2004.

Petani	Kriteria 1 (Rp)	Kriteria 2 (Rp)	Kenaikan Pendapatan	
			(Rp)	(%)
Pola 1	3.519.970	5.725.537	2.205.567	62,66
Pola 2	4.573.630	7.602.512	3.028.882	66,22

Sumber: Analisis data primer, 2004.

Keterangan : Kriteria 1 = Pendapatan non hutan rakyat

Kriteria 2 = Pendapatan non hutan rakyat + hutan rakyat

### Tingkat Kemiskinan

Dalam penelitian ini tingkat kemiskinan diukur dari pendapatan perkapita rumah tangga petani hutan rakyat pola 1 maupun pola 2. Kriteria yang digunakan adalah kriteria kemiskinan yang dikemukakan oleh Sajogyo (1982) yaitu dengan menggunakan tingkat pendapatan perkapita per tahun yang disetarakan ke dalam kilogram beras.

Pada Tabel 3 dan 4 dapat dilihat kriteria tingkat kemiskinan ditinjau dari pendapatan rumah tangga petani hutan rakyat dan pendapatan non hutan rakyat di Desa Soronalan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

Pada tabel 3 dapat dijelaskan bahwa pada

rumah tangga petani hutan rakyat pola 1 terdapat 4 kriteria tingkat kemiskinan, sedangkan pada rumah tangga petani hutan rakyat pola 2 hanya terdapat 2 kriteria tingkat kemiskinan yaitu miskin dan tidak miskin. Persentase tingkat kemiskinan petani hutan rakyat pola 1 lebih tinggi dibandingkan dengan petani hutan rakyat pola 2. yaitu pada petani hutan rakyat pola 1 sebesar 24,24 % sedangkan pada petani hutan rakyat pola 2 hanya 3.70%. Kemudian yang termasuk kedalam golongan tidak miskin pada rumah tangga petani hutan rakyat pola 1 sebesar 75,76% sedangkan pada rumah tangga petani hutan rakyat pola 2 sebesar 96,30%.

Pada Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa

Tabel 3. Kriteria Tingkat Kemiskinan ditinjau dari Pendapatan Rumah Tangga Petani Hutan Rakyat di Desa Soronalan tahun 2004.

Golongan Pendapatan Per Kapitan Per Tahun (Rp)	Kriteria Kemiskinan	Pola 1		Pola 2	
		Jumlah (orang)	Persen (%)	Jumlah (orang)	Persen (%)
1. <= 480.000 (setara dengan <= 240 kg beras)	Miskin Sekarat	2	6,06	0	0
2. 480.000 – 720.000 (setara dengan 240-360 kg beras )	Miskin Sekali	1	3,03	0	0
3. 721.000 – 960.000 (setaradengan 360-480 kg beras)	Miskin	5	15,15	1	3,70
4. > 960.000 (setara dengan > 480 kg beras )	Tidak Miskin	25	75,76	26	96,30
Jumlah		33	100,00	27	100,00

Sumber: Analisis data primer, 2004.

jumlah rumah tangga petani hutan rakyat pola 1 yang miskin sebesar 48,5%, sedangkan pada pola 2 sebesar 37%. Kemudian petani yang tidak miskin pada rumah tangga petani hutan rakyat pola 1 sebesar 51,5% dan pada pola 2 sebesar 63%.

Kemudian perbandingan tingkat kemiskinan ditinjau dari pendapatan hutan rakyat dan pendapatan non hutan rakyat dengan pendapatan non hutan rakyat dapat dilihat pada Tabel 5.

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa: (a)

Pada kriteria 1 jumlah rumah tangga petani hutan rakyat pola 1 yang miskin sebesar 48,50% lebih besar dibandingkan dengan pada kriteria 2 yaitu sebesar 24,24%; (b) pada kriteria 1, jumlah rumah tangga petani hutan rakyat pola 2 yang miskin sebesar 37 persen lebih besar dibandingkan dengan pada kriteria 2 yaitu sebesar 3,7%; (c) pada kriteria 1, jumlah rumah tangga petani hutan rakyat pola 1 yang tidak miskin sebesar 51,50% lebih kecil dibandingkan dengan pada kriteria 2 yaitu sebesar 75,76%; (d) pada kriteria 1, jumlah rumah tangga petani

Tabel 4. Kriteria Tingkat Kemiskinan ditinjau dari Pendapatan Non Hutan Rakyat pada Rumah Tangga Petani di Desa Soronalan Tahun 2004.

Golongan Pendapatan Per Kapitan Per Tahun (Rp)	Kriteria Kemiskinan	Pola 1		Pola 2	
		Jumlah (orang)	Persen (%)	Jumlah (orang)	Persen (%)
1. <= 480.000 (setara dengan <= 240 kg beras)	M. Sekarat	3	9,1	6	22,2
2. 480.000–720.000 (setara dg 240-360 kg beras)	Miskin Sekali	9	27,3	3	11,1
3. 721.000 – 960.000 (setara dengan 360-480 kg beras)	Miskin	4	12,1	1	3,7
4. > 960.000 (setara dengan > 480 kg beras)	Tidak Miskin	17	51,5	17	63,0
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>100,00</b>	<b>27</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Analisis data primer, 2004.

Tabel 5. Perbandingan Persentase Tingkat Kemiskinan Ditinjau dari Pendapatan Hutan Rakyat dan Non Hutan Rakyat dengan Pendapatan Non Hutan Rakyat di Desa Soronalan Tahun 2004.

Tingkat Kemiskinan	Kriteria 1 (%)		Kriteria 2 (%)	
	Pola 1	Pola 2	Pola 1	Pola 2
Miskin sekarat s/d Miskin	48,5	37	24,24	3,7
Tidak Miskin	51,5	63	75,76	96,3
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Analisis data primer, 2004.

Keterangan : Kriteria 1 : pendapatan non hutan rakyat

Kriteria 2 : pendapatan hutan rakyat + non hutan rakyat

hutan rakyat pola 2 yang tidak miskin sebesar 63% lebih kecil dibandingkan dengan pada kriteria 2 yaitu sebesar 96,3%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan hutan

rakyat mempengaruhi besarnya tingkat kemiskinan rumah tangga petani hutan rakyat.

Distribusi Pendapatan Petani

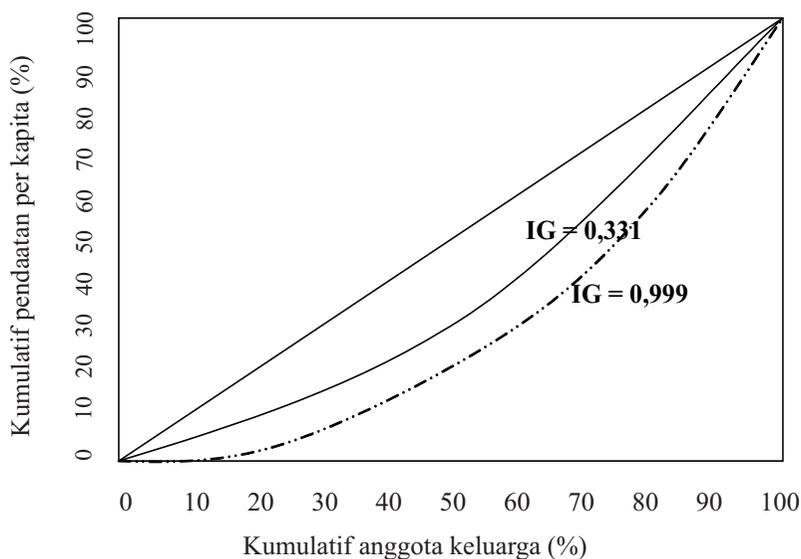
Analisis distribusi pendapatan bertujuan

untuk melihat distribusi pendapatan petani. Distribusi pendapatan rumah tangga petani dapat diketahui melalui beberapa kriteria. Dalam analisis ini kriteria yang digunakan adalah analisis nisbah gini (*gini ratio*). Hasil analisis terhadap distribusi pendapatan hutan rakyat dengan menggunakan *gini ratio* menunjukkan bahwa nilai *gini ratio* adalah 0,3331. Angka ini menunjukkan bahwa diantara petani hutan rakyat tingkat ketimpangannya rendah.

Menurut Todaro (1984) jika angka gini antara 0,2 dan 0,5 menunjukkan distribusi yang merata sedangkan jika terletak antara 0,5 dan 0,7 menunjukkan distribusi tidak merata. Berdasarkan kriteria tersebut maka distribusi petani hutan rakyat yang ditunjukkan dengan

nilai *gini ratio* sebesar 0,331 termasuk dalam kategori distribusi pendapatan yang merata. Berdasarkan hasil analisa maka hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa distribusi pendapatan rumah tangga petani hutan rakyat merata diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan usahatani hutan rakyat memberikan distribusi pendapatan yang merata diantara petani hutan rakyat.

Kemudian analisis distribusi pendapatan berdasarkan nilai *gini ratio* juga dilakukan pada pendapatan non hutan rakyat (pendapatan hutan rakyat tidak masuk kedalam komponen pendapatan). Hasil analisis besarnya nilai *gini ratio* adalah 0,999 artinya diantara petani hutan rakyat tingkat ketimpangannya tinggi sehingga dikategorikan ke dalam golongan distribusi



Keterangan :  
 \_\_\_\_\_ : Indeks gini pada pendapatan rumah tangga hutan rakyat  
 - - - - - : Indeks gini pada pendapatan non hutan rakyat

Gambar 1. Distribusi Pendapatan per Kapita.

pendapatan tidak merata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan hutan rakyat memperbaiki tingkat ketimpangan dan distribusi pendapatan diantara rumah tangga petani hutan rakyat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pada daerah penelitian terdapat dua kombinasi tanaman hutan rakyat, yaitu sengon, kelapa, rumput (pola 1) dan sengon, kelapa, jahe (pola 2).
2. Usahatani hutan rakyat mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Pada petani pola 1 pendapatan rumah tangga meningkat sebesar Rp 2.205.567 atau 62,66 persen, sedangkan pada petani pola 2 pendapatan rumah tangga meningkat sebesar Rp 3.028.882 atau 66,22 persen.
3. Usahatani hutan rakyat mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan tingkat ketidak-miskinan. Pada pola 1, tingkat kemiskinan berkurang dari 48,5 % menjadi 24,24 % dan pada pola dua berkurang dari 37 % menjadi 3,7 %. Pada pola 1 tingkat ketidak-miskinan meningkat dari 51,5 % menjadi 75,76 % dan pada pola 2 dari 63 % menjadi 96,3 %.
4. Besarnya indeks gini pendapatan non hutan rakyat sebesar 0,99 artinya distribusi pendapatannya tidak merata, sedangkan besarnya indeks gini pendapatan non hutan rakyat dan hutan rakyat sebesar 0,33 artinya usahatani hutan rakyat memberikan distribusi pendapatan yang merata diantara petani hutan

rakyat sehingga tingkat ketimpangan dan distribusi pendapatan diantara rumah tangga petani hutan rakyat menjadi lebih baik

### Saran

1. Pengusahaan hutan rakyat mampu meningkatkan penggunaan tenaga kerja keluarga dan pendapatan oleh karena itu diperlukan perhatian yang intensif dari pemerintah daerah untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam pengelolaan hutan rakyat melalui Dinas Pertanian seksi Kehutanan.
2. Tanaman jahe sebagai tanaman bawah tegakan lebih memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan tanaman rumput, oleh karena itu tanaman jahe bisa dipakai sebagai tanaman alternatif yang perlu diperluas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 1995. *Usaha Meningkatkan Luas dan Fungsi Hutan di Jawa Tengah*. Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Usaha Peningkatan Luas dan Fungsi Hutan di Jawa Tengah melalui Pembangunan Hutan Rakyat dan Beberapa Perluasan Lahan serta Pemecahan*. Makalah Diskusi Sehari Sistem Kehutanan Indonesia Dalam Jangka Panjang Tahap kedua, 3 Mei 1993. Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Pengembangan Hutan Rakyat, Temu Usaha Hutan Rakyat Kabupaten Magelang*. November 2001. Dinas Pertanian. Magelang.
- Dampa, Yulia. 2003. *Dampak Pengembangan Kakao bagi Ekonomi Rumah*. UGM, Yogyakarta.
- Erida dan Kusuma. 1996. *Problematika*
-

- Kemiskinan dan Upaya Mengentaskannya*, Majalah Ilmiah No. 50 tahun 1996, Universitas Jambi. Jambi.
- Kurniayari, Risdan Henita. 2002. *Analisa Potensi dan Kontribusi kayu Rakyat terhadap total Pendapatan Rumah Tangga Petani*. Tesis S2, Program Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Mulyono, S. 1998. *Statistik untuk Ekonomi*, Edisi revisi (1998). Kerjasama antara Pusat Antar Universitas Bidang Ekonomi Universitas Indonesia dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Nurwanto, Prakoso. 1979. *Pembentukan Hutan Rakyat sebagai Wujud Nyata Penghijauan untuk Masyarakat*. Seminar dan Reuni Ke III. Fakultas kehutanan UGM. Yogyakarta.
- Prastowo, Hendro. 1994. *Peranan HPH dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan* dalam Dasar-Dasar Pengelolaan HPH Bina Desa Hutan. Yogyakarta. Lembaga Pendidikan Wana Wiyata.
- Remi, Sutyastie Soemitro dan Tjiptoherijanto, Prijono. 2000. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ritohardoyo, SU. 2000. *Pengaruh Penggunaan Lahan Hutan Rakyat terhadap Kesejahteraan Petani di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta.
- Sajogyo. 1982. *Menelaah Garis Kemiskinan*, Lokakarya Metodologi “Kaji tindak” Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil, Cisarua 20-23 Desember 1982. Institut Pertanian Bogor.
- Simon, H. 1998. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat, Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa*. Bigraf Publishing. Yogyakarta.
- Soekartawi. 1993. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian, Teori dan Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suhardjo dan Patong Dahlan. 1973. *Sendi-Sendi Pokok Ilmu Usahatani*. Institut Pertanian Bogor.
- Suparmoko, M. 1997. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. BPF. Yogyakarta.